

## KOMUNIKASI DAN PENGENDALIAN KONFLIK DALAM POLITIK

Oleh  
**Bedjo Sukarno**

### *Abstract*

*Presentation in communicating the message that accompanied with a sense of sincere and honest. Expected to create a culture of mutual trust as a positive emotional entwined in the communication process very effective. In control, conflict management should be directed to the parties involved in the conflict in order to find a common understanding in diversity. To the role of open communication in the reconciliation can be done as a sign of agreement and not leave problems in the future.*

**Keywords:** *communication, conflict, management.*

---

### **Pendahuluan**

Mewujudkan perdamaian tidak harus berarti kita memaksakan satu pandangan yang tidak memihak yang benar mengenai situasi konflik kepada para pelaku, sebab itu kita punya keyakinan bahwa fakta dapat digali dan diuji, bahwa ada suatu kenyataan dan ada upaya untuk menangkap kenyataan itu dapat membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan antara mereka. Konflik dalam negeri mencakup perselisihan suku, agama, politik, sosial ekonomi dan perselisihan lain berdasarkan pada identitas kelompok. Konflik sebaiknya dilihat sebagai proses yang berkembang karena dapat dibandingkan dan diramalkan meski konflik telah menelan korban lebih banyak dibandingkan dengan bentuk-bentuk konflik yang lain.

Di negara yang menganut dan mempunyai pers bebas meski sudah ada perbaikan-perbaikan dalam ketentuan jurnalisme, berita dalam media massa sering memberikan gambaran hitam dan putih mengenai konflik. Berita yang disampaikan semata-mata menyajikan fakta yang sedang terjadi, kurangnya informasi mengenai latar belakang dan konteks konflik menyebabkan *audience* harus melengkapi sendiri berita itu dengan unsur-unsur dari pengalaman pribadi dan prasangka mereka masing-masing. Hal itu adalah manusiawi dan jelas akibat dari ekonomi politik, sistem informasi modern dan karena terbatasnya kemampuan kognitif kita untuk memproses informasi.

Tidak lama kemudian setelah berita itu lenyap sebagai kepala berita dan dari pandangan umum, pelbagai analisis mengenai peristiwa yang bersangkutan

kompleks menjadi bahan perdebatan yang didukung informasi yang lengkap dalam komunitas yang lebih kecil. Arus informasi dan komunikasi akan sulit untuk dikontrol, sehingga dapat mempengaruhi terhadap pandangan ideologi dan politik serta mempengaruhi pula terhadap sistem politik yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan fungsi komunikasi dalam setiap bentuk kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, timbulnya konflik baru terjadi adanya sebuah informasi melalui media sosial dalam kicauannya di akun twitter oleh salah satu elite politik partai dalam masa kampanye telah mengungkit fenomena soal kesalahan yang dilakukan partai lain ketika berkuasa, secara langsung efek pesan tersebut ditanggapi secara diplomatis oleh pihak partai yang merasa pernah mengendalikan pemerintahan. Tetapi elite politik tetap merupakan bagian dari masalah dan bagian pemecahan, ini lebih-lebih lagi di negara-negara korupsi yang peringkatnya termasuk tingkat tinggi. Para pihak yang berkonflik selalu berkecimpung pada persoalan perasaan bahwa dirinya merasa paling di atas segalanya yang akhirnya menumbuhkan egoisme, pada hakekatnya dimiliki oleh manusia.

Kesan yang memamerkan perasaan paling benar, paling jujur, sekaligus merasa paling tak pernah bohong yang sekarang ini sering mengemuka di depan publik. Dampak selanjutnya adalah makin tidak menentunya arah dan tujuan para elite dalam mengelola negara dan bangsa. Padahal apabila dicermati justru keegoisan itulah yang bila tidak segera diatasi akan terus membawa bangsa dan negara ini pada kondisi yang

makin terpuruk. Seperti kita lihat bersama bahwa secara kasat mata mengindikasikan merebaknya korupsi politisi yang melibatkan elite dari pelbagai partai politik yang makin memprihatinkan.

Masa periode yang saat itu disebut demokrasi liberal pada tahun 1950-an adalah sebuah masa ketika retorika politik diukur berdasarkan kualitas argumen di parlemen, bukan retorika murahan yang sekedar menunjukkan keberanian vokalnya, dan tampilan spanduk di jalanan. Tetapi politik lebih dihayati sebagai inisiasi kebudayaan ketimbang transaksi kekuasaan, namun kini sangat terasa dan semakin jelas politik merupakan pesta kaum elite. Hal itu terlihat dalam fenomena perombakan kabinet bersatu jilid dua, konflik yang terjadi soal politik ini didominasi oleh penguasa-penguasa dan elite-elite partai. Karena itu, politik terasa nikmat bagi elite, tetapi jauh dari memberi nikmat kepada rakyat.

Sepertinya, peradaban politik kita ini dibawa arus negatif semacam praktek politik uang dan transaksi kekuasaan, sedangkan kedaulatan etika politik sudah dibajak oleh kekuatan uang. Kejadian sekarang yang dapat kita pahami dari aktivitas politisi bahwa perebutan kekuasaan mengatasnamakan demokrasi, hampir semua fenomena tersebut di belakangnya bukanlah pertarungan memperebutkan cita-cita keperadaban politik yang bersih dan santun. Dengan demikian, gagasan dan cita-cita ideologis apapun tampak tergeser oleh pertimbangan kapital dan justru yang menonjol gejala layaknya saudagar memperebutkan posisi politik sebagai penguatan simbol dari pengaruh kekuasaan elite.

Saat penyelenggaraan pemilu legislatif tinggal beberapa hari lagi mendekati hari 9 April 2014, terjadilah peristiwa aktual pertikaian antar warga di Provinsi Papua dan di Provinsi Aceh konflik antar partai peserta pemilu bahkan ada beberapa orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, konflik ini berawal pada perseteruan dua barisan pejuang yang kini berseberangan jalan atau berbeda partai. Semuanya mungkin bisa bertumpu pada perilaku politik eks gerilyawan yang belum berubah di era perdamaian ini. Padahal, sejatinya demokrasi mencari dan menggali kekuatan untuk mencapai konsensus politik, bukan sekedar demokrasi yang

mengandalkan kebebasan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

### **Komunikasi**

Komunikasi politik bertitik tolak dari nilai-nilai normatif untuk mewujudkan keadaan yang harmonis dalam pergaulan hidup dan berlangsungnya suatu sistem dalam lingkup negara. Proses komunikasi dapat berlangsung secara vertikal ataupun horizontal sesuai dengan tujuan yang diproyeksikan dalam proses tersebut. Dalam perkembangannya, komunikasi dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dalam ruang lingkup negara dimana proses itu berlangsung.

Komunikasi dapat berlangsung searah tanpa adanya sistem *feed back* dan respon sebagai reaksi terhadap pesan yang disampaikan, sehingga komunikasi terbatas dalam masalah-masalah tertentu saja. Reaksi yang diharapkan hanya dalam bentuk pelaksanaan dari apa yang dimaksudkan dalam substansi komunikasi tersebut. Terdapat pula sistem respon yang berkembang ke seluruh arah baik secara vertikal maupun horizontal, bahkan berlipat dalam *multy flow process*. (Sumarno, 1989 : 38)

Di negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi, menghargai terhadap pendapat, buah pikiran orang lain, kebebasan berserikat, maka akan mewarnai terhadap proses komunikasi yang berlangsung. Bila dibandingkan dengan negara-negara yang mengekang dan memonopoli terhadap pendapat umum dan asosiasi yang tumbuh dalam masyarakat, maka komunikasi akan terbatas dalam ruang lingkup yang kecil dan kaku. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan komunikasi dipengaruhi pula oleh sistem politik yang berlangsung di negara di mana komunikasi berproses.

Kelanjutan dalam suatu sistem politik telah melekat bahwa di dalamnya dijiwai pula oleh proses komunikasi, karena dalam setiap proses dalam bentuk atau tingkat apapun akan melibatkan sejumlah pesan-pesan komunikasi. Dengan demikian memberikan suatu pengertian bahwa komunikasi politik berlangsung dalam suatu struktur politik yang berada dalam struktur lembaga negara maupun dalam institusi lain. Struktur yang dimaksud adalah struktur yang ada pada suprastruktur dan pada struktur masyarakat yang memiliki kekuatan budaya dari hasrat emosional manusianya. Biasanya

fenomena komunikasi yang terjadi disebabkan individu dalam sebuah organisasi atau institusi adanya saling tidak percaya satu sama lain, tentunya kejadian itu sulit untuk menemukan kesamaan dan bersatu.

Jadi, rasa percaya memang tidak bisa dianggap sepele karena faktor dalam mengungkapkan perasaan dan gagasan membawa pembaharuan merupakan kunci utama dalam berkomunikasi untuk membangun kesetiaan dalam sebuah kelompok. Karena itu dalam komunikasi perlu dibuat usaha guna mengatasi hambatan, salah paham atau konflik yang mungkin terjadi, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Komunikasi yang ideal itu tidak selalu terjadi karena ada kendala yang menghadang proses berlangsungnya dalam penyampaian ide, tapi hambatan bisa bersifat interpersonal maupun organisasional. (Agus M. Hardjana, 2003 : 40)

Kebersamaan tidak datang dengan sendirinya karena bagian dari sebuah seni, bukannya keajaiban yang dibangun dalam sehari semalam. Bahwa bersatu dan kekompakan sifatnya sangat emosional dan diarahkan pada tujuan serta sasaran utamanya kelompok atau lembaga negara. Di suatu negara misalnya, rakyatnya perlu tahu ke mana tarikan pajak dipergunakan dan untuk tujuan apa, sehingga semua informasi ini disosialisasikan tidak hanya sekali tetapi terus menerus secara kontinu.

Bila sasaran utama tidak terbaca dan sampai tidak dimengeti oleh individu, maka seorang anggota tidak akan berpartisipasi akan bisa membangun hasrat pribadinya dalam ikut menjaga kebersamaan dan kesatuan. Setiap individu perlu memahami tujuan negara atau kelompoknya untuk membela kepentingan bersama bagi semua rakyat maupun anggotanya. Pemahaman akan tujuan bersama ini perlu untuk mengarahkan setiap individu pada tindakannya sehari-hari dengan sebersit tujuan yang sama demi nama baik kelompok atau negaranya. Dengan demikian, kekompakan dan kebersamaan ini merupakan agenda bagi setiap anggota kelompok terutama pemimpinnya.

Untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan tidak bisa diperjuangkan hanya untuk mementingkan kelompok kecilnya karena secara tidak langsung harus membawa kelompoknya untuk menuju kepada komitmen bersama. Pemersatuan

adalah sebuah perjuangan seseorang terutama bila orang tersebut adalah pemimpin yang harapannya sebagai tauladan, sudah barang tentu sulit untuk mengembangkan loyalitasnya. Bila saja setiap anggota kelompok terbiasa berkomunikasi dengan percaya diri mengatakan apa yang dirasakan dan dipikirkan, kemudian menyampaikan apa yang dibutuhkan serta berniat untuk mengembangkan rasa saling percaya diri serta memiliki pemikiran yang positif, maka kerukunan dan kekompakan akan terjaga. Komunikasi yang tulus dan jujur perlu digalakkan karena emosi positif datang dari komunikasi yang efektif dalam menjalin kesepahaman.

Dalam suatu kelembagaan, bahwa komunikasi verbal maupun nonverbal sangat penting sehingga setiap orang diwajibkan untuk berdiskusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang aktual dalam upaya mengantisipasi terjadinya konflik. Pemimpin memang memegang peran sentral untuk membangun rasa subyektif komunikasi positif, senantiasa perlu mawas diri untuk memastikan bahwa transparansi betul-betul bisa dirasakan setiap orang dan anggotanya tidak takut untuk berpendapat, bahkan berbeda pendapat. Bila para pemimpin konsisten dalam memberikan apresiasi secara tulus, tanpa melihat besar atau kecilnya kontribusi, rasa percaya dan kekompakan pasti akan terbangun.

Seperti yang diberitakan kebanyakan media massa belum lama ini, misalnya situasi yang terjadi konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan yang berdampak pada posisi ketua umum Suryadharma Ali. Para kader partai berpendapat bahwa yang dinilai menjadi salah satu penyebab partai gagal memenuhi target suara di pemilu, karena kehadirannya ketua umum dalam kampanye Partai Gerindra di stadion Gelora Bung Karno, Karena itu, hampir saja posisi ketua umum kehilangan legitimasi karena sudah tidak mendapat dukungan dari mayoritas pengurus partai. Kemudian konflik tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui proses Musyawarah Kerja Nasional III di Bogor, dengan jiwa besar Suryadharma Ali mengakui kesalahannya dan memohon maaf, yang akhirnya semua peserta musyawarah kerja memaafkan serta menerima kepemimpinannya kembali.

Menurut pengamat politik dari *Center for Strategic*, Philip Vermonte yang

berpandangan apa yang terjadi di tubuh PPP menunjukkan bahwa struktur partai memiliki sistem demokrasi yang matang. Mekanisme partai tidak bisa disetir seenaknya oleh ketua umumnya, sebab ketika menyimpang dari aturan partai, selanjutnya sistem struktur partai meluruskannya. (Kompas, 25/4/2014: 1).

Komunikasi organisasi dalam bentuk musyawarah kerja adalah sebagai bagian cara untuk memperoleh solusi damai yang harus terus diupayakan dalam bingkai negara kesatuan. Diiringi dengan pendekatan keamanan, pendekatan kultural merupakan langkah untuk menata dan mensukseskan. Dalam proses komunikasi dipastikan berlangsung timbal balik dimana seseorang menggunakan akal pikiran di dalam menginterpretasikan problema yang dihadapi, sehingga terdapat tanggapan yang berbeda antara kedua belah pihak yang berinteraksi, yang mana mereka lebih banyak menyatukan perasaan yang cenderung berpadu dalam kesamaan.

### **Konflik**

Pengertian konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial politik setiap masyarakat, bahkan sering dijadikan prasyarat yang diperlukan untuk perubahan sosial. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan sesuatu hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan. Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Tapi sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi, konflik dan kesepakatan disini merupakan gejala-gejala yang tak terelakan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, konflik mengandung pengertian benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok benturan dengan kelompok, konflik individu dan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1992 : 149). Seperti rasa frustrasi yang dirasakan perorangan dan kelompok dapat menimbulkan sikap memecah belah setelah beberapa waktu menciptakan rasa sakit hati yang mendalam. Ini sering dimanfaatkan oleh elit setempat yang

memperlakukan perasaan itu seakan-akan merupakan nilai-nilai, kepentingan, dan kebutuhan kelompok.

Negara yang terlibat konflik sering menunjukkan ketinggalan, bukan kemajuan baik dari sisi indikator ekonomi dan sosial. Karena itu, memahami akar penyebab konflik dan mengetahui identifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi angka kematian akibat konflik, juga sangat penting untuk meningkatkan pembangunan manusia dan membasmi kemiskinan. Betapa pentingnya untuk memahami penyebab konflik, mengingat sangat banyaknya konflik politik yang terjadi di dunia saat ini.

Tidak ada masyarakat yang luput dari konflik betapapun kecil, termasuk protes politik, kejahatan dengan kekerasan dan kekacauan sipil di sana-sini. Di tingkat paling rendah konflik-konflik semacam itu tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sebagian besar konflik sekarang ini terjadi di dalam negeri meski seringkali ada campur tangan yang cukup besar dari luar, bahkan tidak saja penduduk sipil sengaja dijadikan sasaran akibat konflik disebabkan perekonomian kacau atau krisis.

Faktor-faktor politik dapat turut menimbulkan kekerasan yang berkaitan dalam kombinasi dengan faktor ekonomi, menurunnya layanan masyarakat, seperti negara yang represif dapat mematahkan potensi konflik ketika di Indonesia pada masa Suharto. Kemudian dari pelbagai variable yang menyangkut kegagalan negara yaitu pendapatan yang rendah selain merupakan penyebab konflik juga merupakan akibat dari konflik. Kesenjangan antar kelompok dalam politik banyak ditemukan akibatnya penggunaan kekerasan, bukan berupaya mengatasi perbedaan melalui komunikasi politik.

Dewasa ini dengan berkembangannya masyarakat sipil dan adanya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia, pemahaman dan sensitivitas anggota masyarakat terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum semakin meningkat. Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia di masyarakat dan organisasi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi.

Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam, karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang semata-mata satu sama lain sering

menimbulkan konflik. Konflik bisa juga terjadi karena mempunyai latar belakang kecemburuan ekonomi dan perilaku bersifat yang tidak merata. Di samping itu, orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Dalam hal ini kebutuhan merupakan terjadinya perilaku manusia, jika terabaikan atau terhambat maka bisa memicu konflik. (Wirawan, 2010, 12)

Budaya Jawa merupakan budaya yang adiluhung yaitu budaya yang mulia dan berisi norma, nilai-nilai serta tradisi yang luhur. Budaya ini berisi *pitutur* atau petuah dan petunjuk bagaimana manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, para cendekiawan dan pemimpin orang Jawa menyadari bahwa konflik merupakan fenomena alami, selalu terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, kadang sulit dihindari dan tidak dapat dicegah. Apalagi sebagian pemimpin di negeri ini bersifat feodalisme setelah menduduki jabatan lupa dengan konstituennya.

Komunikasi yang tidak baik, bisa terjadi dikarenakan gaya berbicara atau budaya komunikasi suatu kelompok masyarakat tertentu seringkali menyinggung perasaan orang yang tidak memahaminya. Komunikasi politik kemungkinan terjadi dari seluruh individu yang berada pada infrastruktur politik, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar dan lembaga-lembaga yang erat kaitannya dengan kehidupan politik. Kelompok-kelompok tersebut dapat menggerakkan sejumlah besar individu manusia yang disebut massa baik yang bersifat konstruktif ataupun bersifat destruktif, bahkan untuk merebut kekuasaan atau untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah dan dapat pula menggunakan militansi dari massa ini.

Dalam kehidupan politik massa dapat digunakan oleh elite-elite tertentu di dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Gerhart D. Wiebe dalam Sumarno AP (1989:120), melihat massa itu jumlah manusia yang tidak mempunyai status dalam masyarakat, maka massa tidak dapat dijadikan sebagai komunikan politik secara permanen namun untuk menjaga ketentraman dan mencegah perilaku negatif atau melampaui batas yang mungkin dapat ditimbulkan oleh massa ini. Oleh karena itu, setiap negara yang menganut sistem politik yang bagaimanapun bentuknya selalu

menentukan batas-batas kebebasan melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengendalian Konflik**

Konflik merupakan fenomena yang seringkali tidak bisa dihindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Seperti sumber-sumber organisasi, sumber daya manusia, sumber finansial, sumber daya teknologi hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik bukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.

Maka manajemen konflik bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Hal ini, pihak yang berkonflik berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan pelbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin. Dengan penggunaan manajemen konflik proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk mengendalikan konflik supaya tidak berkembang menjadi konflik destruktif.

Di sisi lain, manajemen konflik sebagai aktivitas untuk mengendalikan dan menciptakan konflik konstruktif yang menguntungkan, mengembangkan kreativitas, inovasi dan *win-win solution*. Dalam pengelolaan konflik ini bisa dilakukan oleh organisasi yang memiliki keahlian dan kemampuan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi non pemerintah maupun masyarakat sipil, bertujuan menciptakan organisasi yang sehat dan menguntungkan.

Organisasi yang sehat mampu menyesuaikan diri dan berkembang dalam jangka panjang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internalnya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan akan memfokuskan diri pada pencapaian tujuan yang rasional. Sebaliknya yang mengalami konflik berkepanjangan akan menghabiskan energinya untuk saling merusak atau berarti organisasi tidak sehat.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang anggota organisasi tidak mungkin bekerja

sendiri, untuk itu memerlukan bantuan rekan anggota yang lain. Orang tersebut harus berupaya dengan rasa kesungguhan menjalin komunikasi dengan baik pada rekannya yang lain. Ia harus memahami keragaman karakteristik lingkungan sosialnya memiliki pelbagai perbedaan level eselon dalam struktur organisasi dan perbedaan suku, agama, pola pikir dan sebagainya.

Manajemen konflik harus diarahkan agar pihak-pihak yang terlibat konflik memahami keragaman tersebut. Tanpa pemahaman yang baik, konflik tidak saja akan selalu terjadi tetapi sukar untuk dikelola dengan baik. (Wirawan, 2010 : 132)

Dalam kehidupan berorganisasi memang konflik tidak mungkin dihindari, akan tetapi terdapatnya perbedaan pendapat dipandang memperkaya bukan halangan, dalam hal tertentu seseorang bebas untuk membuat keputusan tanpa memperhitungkan masukan orang lain. Karena dalam negara demokrasi setiap warga negara, kelompok atau organisasi masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan. Konflik itu dapat diarahkan menuju ke kebaikan, tetapi juga dapat dibiarkan menjadi kacau balau dalam kehidupan di masyarakat dalam suatu negara.

Maka, kecakapan untuk menangani, mengolah, dan mengatasi konflik sesuatu yang perlu dikuasai oleh setiap pemimpin. Sebagai pemimpin diharapkan mampu mengambil keputusan yang baik yaitu bermutu dan bisa diterima oleh orang banyak. Sebab itu, memandang segala konflik sebagai hal yang harus ditolak merupakan sikap yang tidak sehat.

Menghindari dari konflik itu justru membuat diri kita tidak mampu melihat manfaat perbedaan pendapat, pemecahan masalah secara kreatif. Sebagai contoh, dalam sistem politik hanya akan mentolelir konflik yang tidak menghancurkan dirinya, melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga organisasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan. Organisasi atau kelompok seperti partai politik, organisasi mahasiswa ialah sebagai lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik dengan cara berdialog atau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkonflik. (Ramlan Surbakti, 1992: 1220)

Juga berfungsi menampung dan memadukan pelbagai aspirasi dan kepentingan untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan. Dalam mencapai penyelesaian yang berupa keputusan tersebut diperlukan kesediaan berkompromi diantara para anggota selaku wakil dari suatu organisasi yang berkenaan dengan kepentingannya. Jika dari lembaga yang berkepentingan keberatan untuk mengadakan kompromi maka sudah dapat diprediksikan bahwa organisasi itu bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.

Pendekatan yang harus dilakukan untuk mencegah terciptanya konflik baru, maka melalui proses komunikasi politik oleh lembaga politik untuk menemukan solusi dari diantara perbedaan yang sulit dapat dipadukan dan berlangsung secara efektif. Perbedaan apabila diolah dengan baik dapat menambah energi organisasi untuk mengatasi masalah, meningkatkan kreativitas, dan mendorong untuk memecahkan masalah secara kreatif. Sebaliknya, jika tidak diolah dengan baik konflik tidak akan membawa kebaikan dan malah tidak produktif.

Berikut ini strategi pengendalian konflik menggunakan teknik komunikasi dalam kehidupan pribadi individu maupun aktivitas organisasi. Konflik melibatkan ketidaksepakatan mengenai alokasi sumber daya, pertentangan mengenai sasaran, nilai, persepsi, kepribadian dan yang lain masih banyak lagi. Kebanyakan konflik yang sering dialami dan muncul dari persoalan komunikasi mengenai keinginan, kebutuhan dan sumber nilai kepada orang lain, kadang-kadang berkomunikasi dengan jelas tetapi orang lain mempunyai pendapat yang diperjuangkan atau kebutuhan yang berbeda.

Oleh karena itu, pimpinan organisasi politik atau manajer dapat menggunakan dominasinya dan cara untuk menekan dalam menangani konflik yang terjadi pada anggotanya. Selain itu teknik negosiasi adalah salah satunya dianggap dapat membantu dalam tipe apapun lebih efektif dan memberi hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Negosiasi merupakan sebuah proses interaksi diantara mereka yang terlibat konflik melalui proses komunikasi kompleks untuk memecahkan persoalan yang sedang mereka hadapi.

Menurut Lewicki dan Litterer (1986 :230), bahwa dalam pelbagai situasi apapun

negosiasi ditentukan oleh tiga karakteristik, yaitu :

1. Apa yang diinginkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan tidak selalu dikehendaki oleh pihak lain.
2. Mungkin tidak adanya peraturan yang pasti atau prosedur untuk menyelesaikan konflik, sebab itu pihak yang berkonflik memilih bertindak di luar peraturan untuk menemukan penyelesaiannya sendiri.
3. Semua pihak, sekurang-kurangnya pada suatu saat lebih suka mencari persetujuan dari pada bertentangan secara terbuka, atau membawa perselisihan mereka kepada pemegang wewenang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pemecahan.

Dengan demikian, kedua belah pihak berusaha untuk melakukan rekonsiliasi kepentingan mereka yang ditandai dengan proses terjadinya komunikasi yang kompleks dan terbuka. Rekonsiliasi dilakukan, agar resolusi konflik tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari serta pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mendendam dan kembali berdamai seperti sebelum terjadinya konflik.

### **Penutup**

Dalam bangsa yang majemuk selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Kemudian muncullah masalah ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama, hal itulah yang memicu pelbagai konflik selama ini. Konflik biasanya merupakan hasil dari pelbagai persoalan mengenai politik, ekonomi, hukum, suku, agama dan budaya. Persoalan dari pelbagai sumber nilai tersebut masing-masing setiap sudut persepsi mengenai konflik memiliki karakter lokal yang sangat melekat.

Melihat dari aspek politik, bahwa penyelenggara pemerintahan sekarang ini baik pusat maupun lokal terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, termasuk para politisi juga sibuk menyusun strategi dalam mempersiapkan dan mempertahankan posisi kedudukannya dalam berpolitik. Sehingga

ada yang diabaikan dalam menghadapi gejala-gejala benturan sosial yang semestinya harus ditangani sejak dini. Ketika konflik antar warga muncul terjadi di daerah-daerah yang dipicu kesalahpahaman, dan beberapa kasus pemilihan umum kepala daerah, yang akhirnya penanganannya terlambat.

Ketika menarik garis-garis kecil yang sejajar untuk memperjelas permasalahan ditemukan disebagian masalah kecilpun sudah menyulut rasa emosional warga hingga marah dan bertikai. Bahkan berkembang sampai melibatkan beberapa orang, gesekan mudah melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tidak mampu mengatasinya, meletuslah konflik lebih besar. Karena itu, konflik sosial harus serius diantisipasi sebelum menggoncang sendi-sendi bangunan bangsa kita.

### **Daftar Pustaka**

- AgusH. Hardjana, 2003, *Komunikasi intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*, Kanisius. Yogyakarta
- Anonim, 2014, *Berita*, Jakarta, Kompas, 25 April 2014
- Dan Nimmo, 1989, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Remaja Karya. Bandung
- Anwar, Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol, 2005, *Konflik KekerasanInternal, Tinjauan Sejaah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia*, YayasanObor Indonesia. Jakarta
- James AF.Stoner, R.Eward Freeman, Daniel R.Gilbert, 1996, *Alih Bahasa : Alexander Sindoro*, Prenhallindo, Jakarta.
- Maurice Douvenger, 1998, *Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widayarsana, Jakarta
- Sumarno.AP, 1989, *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Uly Arriani, 2010, *Komunikasi Politik*, Universitas Pajajaran, Bandung
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.